

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 205 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL  
TAHUN 2024

**RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2024**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

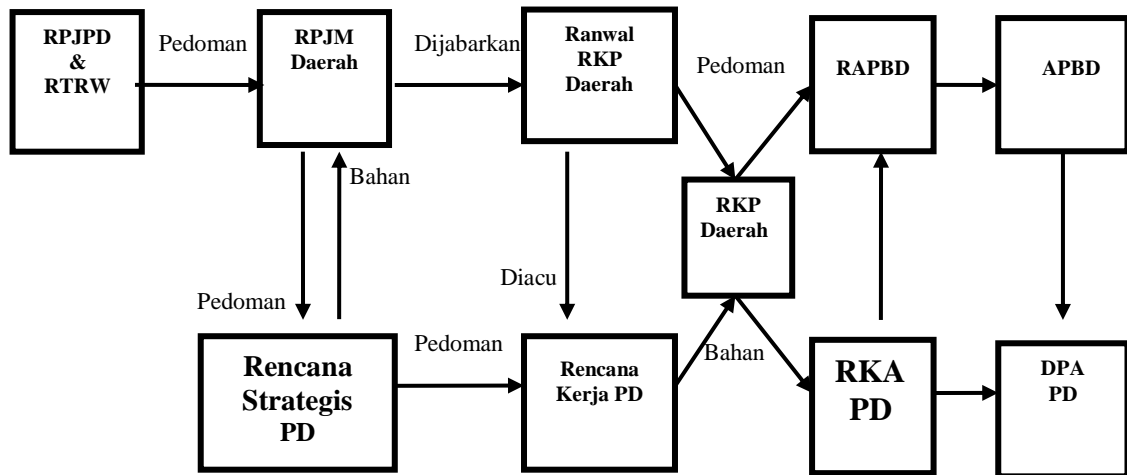
**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan rincian mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang dan Renstra Dinas Sosial.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Sosial menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan, forum Perangkat Daerah, pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kebijakan Pemerintah Pusat.

## KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. dan merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak berkepentingan. Proses penyusunan Rencana Kerja memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Malang, diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasis perencanaan masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari para *stakeholders*, selanjutnya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah merubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan:

- Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Nomor: 005/8471/35.07.202/2022, tanggal 19 Desember 2022, perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024;
- Surat Edaran Bupati Malang, Nomor 2103 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Nomor 050/2636/35.07.202/2023, tanggal 12 Mei 2023, perihal Penyampaian Pagu Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Batas Akhir Input pada SIPD-RI;
- Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Nomor 000.7.2.4/3055/35.07.202/2023, tanggal 31 Mei 2023, perihal Penyampaian Pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Batas Akhir Input pada SIPD-RI.
- Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Nomor 000.7.2.4/3373/35.07.202/2023, tanggal 15 Juni 2023, perihal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Dokumen Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang. Sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD). Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2024 memuat program dan kegiatan serta indikator pencapaiannya yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 dengan rencana besaran dan sumber pendanaannya yang berasal dari APBD Kabupaten Malang serta hasil usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Tahun 2024.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 192 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 192 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 192 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 28 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 34 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 86 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 86 Seri D);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial adalah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Malang.
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) Tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Dinas Sosial Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Sosial
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial
- 3.3. Program dan Kegiatan



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Dinas Sosial Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Sosial**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 harus dilakukan evaluasi terhadap Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 dan 2023. Evaluasi meliputi meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Secara Rinci realisasi program/kegiatan yang memenuhi dan tidak memenuhi target, faktor-faktor penyebab terpenuhi/tidak terpenuhi target kinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Pada tahun 2022 Dinas sosial telah melaksanakan 7 (tujuh) program dan 16 (enam belas) kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Kerja. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 rencana realisasi target telah tercapai/terpenuhi sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata nilai capaian program dan kegiatan telah diperoleh rata-rata tingkat realiasi capaian yang sangat tinggi. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, capaian kinerja Dinas Sosial sebesar 91,39 % karena adanya pengurangan target kinerja, sementara realisasi anggaran sebesar 87,35%. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan tingkat capaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022 tersaji pada tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d Tahun 2023**  
**Dinas Sosial Kabupaten Malang**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 2022			Target Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 =10/4
	<b>Urusan : Sosial</b>									
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)</b>	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100	0	3 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	25
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah</b>	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	34 Orang	-	30 Orang	30 Orang	100	0	30 Orang	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	-	-	-	-	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	85,2
2.2	Penyediaan Administrasi	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu	26 ob	-	26 ob	26 ob	100	0	26 ob	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 2022			Target Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	Pelaksanaan Tugas ASN	tahun (OB)								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	25
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100	-	3 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	25
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	3 dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100	-	3 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	25
3.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	60 Stel	-	60 Stel	60 Stel	100	-	60 Stel	100
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket	-	-	-	-	-	-	0
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	10 Orang	-	10 Orang	-	-	-	-	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 2022			Target Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	-	-	-	-	-	-	0
4.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	15 Buah	-	15 Buah	15 Buah	100	-	15 Buah	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	-	-	-	-	15 Paket	15 Paket	25
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	15 Buah	-	15 Buah	15 Buah	100	-	15 Buah	100
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	-	-	-	-	15 Paket	15 Paket	25
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	15 Buah	-	15 Buah	15 Buah	100	-	15 Buah	100
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	-	-	-	-	15 Paket	15 Paket	25
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	15 Buah	-	15 Buah	15 Buah	100	-	15 Buah	100
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	25
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	15 Eksemplar	-	15 Eksemplar	15 Eksemplar	100	-	15 Eksemplar	100
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	-	-	-	-	15 Dokumen	15 Dokumen	25
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	15 HOK	-	15 HOK	15 HOK	100	-	15 HOK	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 2022			Target Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	-	-	-	-	10 Laporan	10 Laporan	16
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	50 HOK	-	50 HOK	50 HOK	100	-	50 HOK	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	-	-	-	-	10 Laporan	10 Laporan	16
5.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100	-	5 Unit	100
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	25
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	100 Surat	-	100 Surat	100 Surat	-	-	100 Surat	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	-	25
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	100	-	1 Tahun	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	25
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 OB	-	2 OB	2 OB	100	-	2 OB	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 2022			Target Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
8.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Koordinasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PSKS yang mendapat upaya pemberdayaan sosial (Jumlah PSKS yang mendapat upaya pemberdayaan sosial)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah PSKS yang melaksanakan pelayanan social	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100	-	50 Orang	100
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	25
9.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah TKSK yang melaksanakan layanan sosial	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100	-	50 Orang	100
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	25
9.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS mendapat upaya pemberdayaan social	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100	-	50 Orang	100
		Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya	200	-	-	-	-	50	50 Keluarga	25



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 2022			Target Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga					Keluarga		
9.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah PSKS kelembagaan yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	40 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Kegiatan Bimtek Penguatan Sumber Daya Manusia (LK3)	40 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Sertifikat	-	-	-	-	-	-	-
III	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	100 %	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang tertangani</b>	10 Orang	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 2022			Target Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
10.1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang tertangani	10 Orang	-	10 Orang	10 Orang	100	-	10 Orang	100
		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	25
<b>IV</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial</b>	100 %	-	-	-	-	-	-	-
11	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Penyediaan Permakanan	jumlah paket bantuan permakanan yang diberikan kepada PMKS	245 Paket	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	980 Orang	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Penyediaan Sandang	jumlah paket bantuan sandang yang diberikan kepada PMKS	50 Paket	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 2022			Target Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
11.3	Penyediaan Alat Bantu	jumlah penyandang disabilitas yang mendapat alat bantu	265 Unit	-	120 Unit	120 Unit	100	-	120 Unit	45
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	265 Orang	-	-	-	-	75 Orang	75 Orang	28
11.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10 Orang	-	10 Orang	10 Orang	100	-	10 Orang	100
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	25
11.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	jumlah PMKS penyandang disabilitas yang mendapat pelayanan bimbingan dan fisik,mental,spiritual dan social	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100	-	5 Dokumen	100
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	480 Orang	-	-	-	-	120 Orang	120 Orang	25
11.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah PMKS,disabilitas dan lansia yang mendapat pelayanan bimbingan fisik ,mental,spiritual dan sosial	400 Orang	-	120 Orang	120 Orang	100	-	120 Orang	30
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2800 Orang	-	-	-	-	120 Orang	120 Orang	4,2
11.7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS yang menerima Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Orang	-	10 Orang	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 2022			Target Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	-	-	-	-	-	-	-
11.8	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS yang menerima Pelayanan Kedaruratan	10 Orang	-	10 Orang	10 Orang	100	-	10 Orang	100
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	25
11.9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PMKS yang menerima layanan Penelusuran Keluarga	10 Orang	-	10 Orang	10 Orang	100	-	10 Orang	100
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	25
11.10	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang menerima layanan rujukan	10 Orang	-	10 Orang	10 Orang	100	-	10 Orang	100
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	25
12	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah PMKS selain anak, disabilitas dan lansia yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Penyediaan Permakanan	jumlah paket bantuan permakanan yang diberikan kepada PMKS selain anak, disabilitas dan lansia	50 Paket	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Pemberian Bimbingan Fisik,	jumlah PMKS, disabilitas dan lansia yang	25 Orang	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 2022			Target Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	Mental, Spiritual, dan Sosial	mendapat pelayanan bimbingan fisik ,mental,spiritual dan sosial								
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pemberian Bimbingan Sosial	25 Keluarga	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	-	-	-	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>100 %</b>	-	-	-	-	-	-	-
13	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data Fakir Miskin yang mendapatkan Pelayanan</b>	<b>3 Dokumen</b>	-	-	-	-	-	-	-
13.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Desa/Kelurahan yang terverifikasi, tervalidasi dan terkelola	390 Dokumen	-	390 Dokumen	390 Dokumen	100	-	390 Dokumen	100
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	390 Keluarga	-	-	-	-	390 Keluarga	390 Keluarga	25
13.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Sosial	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100	-	4 Dokumen	100
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	25

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 2022			Target Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2023		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
13.3	Fasilitasi Pengembangan Masyarakat	Bantuan Ekonomi	E-Warung/Agen yang Mendapatkan Sosialisasi, serta KUBE yang mendapatkan pendampingan dan Pemberdayaan	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	-	2 Dokumen	100
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	-	-	-	-	20 Orang	20 Orang	25
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
14	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Penyediaan Makanan		jumlah bantuan makanan yang diberikan kepada KBA/KBS	245 Paket	-	245 Paket	245 Paket	100	-	245 Paket	100
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4800 Orang	-	-	-	-	646 Orang	646 Orang	13
14.2	Penyediaan Sandang		jumlah bantuan sandang yang diberikan kepada KBA/KBS	50 Orang	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	245 Orang	-	-	-	-	-	-	-
15	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Kampung Siaga Bencana</b>	7 KSB	-	7 KSB	7 KSB	100	-	7 KSB	100
15.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga		Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	33 Dokumen	-	10 dokume	10 dokume	100	-	10 dokumen	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 2022			Target Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	Bencana				n	n				
		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Kampung	-	-	-	-	7 Kampung	7 Kampung	25
15.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tagana	7 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100	-	7 Dokumen	100
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	-	-	-	-	80 Orang	80 Orang	20
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase terciptanya fungsi TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keperintisan</b>	100	-	-	-	-	-	-	-
16	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keperintisan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Hari Pahlawan, Pemeliharaan 13 TMP, Sarasehan, honor Penjaga	2 Kali	-	2 Kali	2 Kali	100	-	2 Kali	100
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	13 Makam	-	-	-	-	13 Makam	13 Makam	25
16.2	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Hari Pahlawan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	25

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja (termasuk SPM, IKK sesuai PP No. 6 Tahun 2008) dan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dapat dilihat dalam **tabel 2.2** tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Malang.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (SPM Bidang Sosial) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial diwilayah Kabupaten yang terdiri atas :

- a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten
  - c. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Kabupaten
  - d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kabupaten
1. **Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial** meliputi :
    - a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Kabupaten
    - b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten
  2. **Penyediaan sarana prasarana sosial** meliputi :
    - a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kabupaten
    - b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten
  3. **Penanggulangan korban bencana** meliputi :
    - a. Bantuan bagi korban bencana skala Kabupaten
    - b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten
  4. **Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu,** meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi :
    - a. Penyandang cacat fisik dan mental
    - b. Lanjut usia tidak potensial skala Kabupaten





No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	-	-	3 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> <b>Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	-	-	30 Orang	-	-	-	30 Orang	-	-	-	-
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	-	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	-
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	-	-	26 ob	-	-	-	26 ob	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun	-	-	3 dokumen	-	-	-	3 dokumen	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	-	-	3 dokumen	-	-	-	3 dokumen	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-
3.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> <b>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	-	-	60 Stel	-	-	-	60 Stel	-	-	-	-

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	60 Paket	60 Paket	60 Paket	-	60 Paket	-	-	-
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	-	-	10 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	10 Orang	10 Orang	10 Orang	-	-	-	-	-
4.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	-	-	15 Buah	-	-	-	15 Buah	-	-	-	-
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	15 Paket	15 Paket	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	15 Paket	-
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	-	-	15 Buah	-	-	-	15 Buah	-	-	-	-
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	15 Paket	15 Paket	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	15 Paket	-
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	15 Buah	-	-	-	15 Buah	-	-	-	-
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	15 Paket	15 Paket	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	15 Paket	-
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	15 Buah	-	-	-	15 Buah	-	-	-	-
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	15 Paket	15 Paket	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	15 Paket	-
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	15 Eksempla r	-	-	-	15 Eksempl ar	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	-	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	-
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	-	-	15 HOK	-	-	-	15 HOK	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	-	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	-
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	-	-	50 HOK	-	-	-	50 HOK	-	-	-	-

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	-	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	-
5.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> <b>Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	-	5 Unit	-	-	-	5 Unit	-	-	-	-
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	-
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> <b>Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	-	-	100 Surat	-	-	-	100 Surat	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	-	-	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-	2 OB	-	-	-	2 OB	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> <b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	-	-	15 Unit	-	-	-	15 Unit	-	-	-	-

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	15 Unit	15 Unit	15 Unit	-	15 Unit	15 Unit	15 Unit	-
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	-	-	3 Unit	-	-	-	3 Unit	-	-	-	-
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	-	-	15 Unit	-	-	-	15 Unit	-	-	-	-
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	15 Unit	15 Unit	15 Unit	-	15 Unit	15 Unit	15 Unit	-
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b> <b>Persentase Masyarakat yang meningkat dalam Kepedulian Sosial</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> <b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Sumbangan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Koordinasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	-	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-
9	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b> <b>Jumlah PSKS yang mendapat upaya pemberdayaan sosial (Jumlah PSKS yang mendapat upaya pemberdayaan sosial)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial	-	-	50 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	-
9.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah TKSK yang melaksanakan layanan sosial	-	-	50 Orang	-	-	-	50 Orang	-	-	-	-



No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang tertangani	-	-	10 Orang	-	-	-	10 Orang	-	-	-	-
	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	10 Orang	10 Orang	10 Orang	-	10 Orang	10 Orang	10 Orang	-
<b>IV</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b> <b>Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> <b><i>Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Penyediaan Permakanan Jumlah paket bantuan permakanan yang diberikan kepada PMKS	-	-	245 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	245 Orang	245 Orang	245 Orang	-	245 Orang	245 Orang	245 Orang	-
11.2	Penyediaan Sandang Jumlah paket bantuan sandang yang diberikan kepada PMKS	-	-	50 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	50 orang	50 orang	50 orang	-	50 orang	50 orang	50 orang	-
11.3	Penyediaan Alat Bantu Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat alat bantu	-	-	265 Unit	-	-	-	120 Unit	-	-	-	-
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	265 Orang	265 Orang	265 Orang	-	265 Orang	265 Orang	265 Orang	-
11.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	10 Orang	-	-	-	10 Orang	-	-	-	-
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	10 Orang	10 Orang	10 Orang	-	10 Orang	10 Orang	10 Orang	-





No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.1	Penyediaan Permakanan jumlah paket bantuan permakanan yang diberikan kepada PMKS selain anak,disabilitas dan lansia	-	-	50 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	25 Orang	25 Orang	25 Orang	-	25 Orang	25 Orang	25 Orang	-
12.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial jumlah PMKS,disabilitas dan lansia yang mendapat pelayanan bimbingan fisik ,mental,spiritual dan sosial	-	-	25 Orang	-	-	-	25 Orang	-	-	-	-
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	25 Orang	25 Orang	25 Orang	-	25 Orang	25 Orang	25 Orang	-
12.3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pemberian Bimbingan Sosial	-	-	25 Keluarga	-	-	-	25 Keluarga	-	-	-	-
	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	25 Orang	25 Orang	25 Orang	-	25 Orang	25 Orang	25 Orang	-
<b>V</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b> <b>Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan</b> <b>Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> <b>Jumlah Data Fakir Miskin yang mendapatkan Pelayanan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Desa/Kelurahan yang terverifikasi, tervalidasi dan terkelola	-	-	390 Dokumen	-	-	-	390 Dokumen	-	-	-	-
	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	-	-	-	390 Keluarga	390 Keluarga	390 Keluarga	-	390 Keluarga	390 Keluarga	390 Keluarga	-
13.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah KPM yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Sosial	-	-	4 Dokumen	-	-	-	4 Dokumen	-	-	-	-
	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat E-Warung/Agen yang Mendapatkan Sosialisasi, serta KUBE yang mendapatkan pendampingan dan Pemberdayaan	-	-	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	-
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	-
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b> <b>Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b> <b>Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Penyediaan Makanan Jumlah bantuan makanan yang diberikan kepada KBA/KBS	-	-	245 Paket	-	-	-	245 Paket	-	-	-	-
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	1200 Orang	1200 Orang	1200 Orang	-	646 Orang	1200 Orang	1200 Orang	-
14.2	Penyediaan Sandang Jumlah bantuan sandang yang diberikan kepada KBA/KBS	-	-	50 Orang	-	-	-	50 Orang	-	-	-	-
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	245 Orang	245 Orang	245 Orang	-	245 Orang	245 Orang	245 Orang	-
15	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> <b>Jumlah Kampung Siaga Bencana</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	-	-	33 Dokumen	-	-	-	10 dokumen	-	-	-	-
	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	7 Kampung	7 Kampung	7 Kampung	-	7 Kampung	7 Kampung	7 Kampung	-
15.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tagana	-	-	7 Dokumen	-	-	-	7 Dokumen	-	-	-	-
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	80 Orang	80 Orang	80 Orang	-	80 Orang	80 Orang	80 Orang	-

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>											
	<b>Persentase terciptanya fungsi TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keperintisan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>											
	<b>Jumlah TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keperintisan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Hari Pahlawan, Pemeliharaan 13 TMP, Sarasehan, honor Penjaga	-	-	2 Kali	-	-	-	2 Kali	-	-	-	-
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-	-	-	13 Makam	13 Makam	13 Makam	-	13 Makam	13 Makam	13 Makam	-
16.2	Terlaksananya Kegiatan Hari Pahlawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial**

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tataran menengah ke bawah. Selain itu pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni : adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai kepentingan di Kabupaten Malang telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

- (i) Ketersediaan data PMKS yang valid masih jauh dari yang diharapkan, sehingga jumlah PMKS yang tertangani masih sangat terbatas;
- (ii) Jumlah populasi anak terlantar dari tahun ke tahun di Kabupaten Malang semakin meningkat;
- (iii) Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sebagai dampak melemahnya fungsi koordinasi dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses, kuantitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi

dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial selama tahun 2021-2026, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

### **Tantangan dan Peluang**

Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor : 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, dan diberikan kewenangan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), upaya pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan agar PMKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak.

Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka perlu didukung dengan serta antara pemerintah dan masyarakat.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Malang sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dirasakan penting mengingat jumlah penyandang masalah di Kabupaten Malang jumlahnya cukup besar

Tantangan dan Peluang dalam Memberikan Pelayanan

Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang meliputi :

- Adanya sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait;
- Dukungan masyarakat, swasta dan dunia usaha;
- Adanya kerjasama antara pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
- Adanya panti-panti sosial dan PSKS;
- Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang meliputi :

- Multikrisis yang berkepanjangan dan kompleks dapat menyebabkan rentannya ketahanan sosial.
- Kondisi ekonomi, politik yang belum stabil
- Rendahnya partisipasi sosial masyarakat

Isu strategis penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan evaluasi capaian pembangunan kesejahteraan sosial sampai tahun 2023.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan isu strategis pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Malang Tahun 2021 sebesar 10,15%. Pemerintah Kabupaten Malang terus berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut adalah optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada sasaran rumah tangga sangat miskin (RTSM).

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Terdapat perbedaan jumlah antara nilai yang terdapat di RKPD dengan analisis kebutuhan, hal ini dapat dilihat dalam **tabel 2.3**.

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pen ting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Malang	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 (%)	8,220,950,000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Malang	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 (%)	6.822.934.850	
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Malang	<i>Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu</i>	<b>3 Dokumen</b>	7,800,000	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Malang	<i>Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu</i>	<b>3 Dokumen</b>	<b>0</b>	
1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	7,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	0	
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Malang	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>6,525,000,000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Malang	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>6.726.854.850</b>	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bula n	5,627,200,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 ASN	5.928.818.262	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Laporan	880,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	26 ob	798.036.588	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ASN					ASN			
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 dokumen	7,700,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 dokumen	0	
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	10.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	0	
3.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>42.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	0	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Stel	31.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Stel	0	
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	11.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0	
4.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>820.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah</b>	<b>7 Dokumen</b>	0	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	15 Paket	9.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	0	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pen ting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Disediakan					yang Disediakan			
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	133,450,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	0	
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.050.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	0	
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	90,500,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	0	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	13.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Jenis	0	
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	85.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	0	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	486.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	0	
5.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	5 Dokumen	<b>139.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	<b>1 Dokumen</b>	0	
5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	139.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pen ting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Malang	<b>Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>138,300,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Malang	<b>Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>96.080.000</b>	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46.350.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.480.000	
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	53.600.0000	
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Malang	<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>551,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Malang	<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>0</b>	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	164.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	0	
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	355.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pen ting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	32.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	0	
II	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase Masyarakat yang meningkat dalam Kepedulian Sosial</b>	<b>100 (%)</b>	<b>2,505,000,000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase Masyarakat yang meningkat dalam Kepedulian Sosial</b>	<b>100 (%)</b>	<b>0</b>	
8	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>60,000,000</b>	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>0</b>	
8.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Malang	Jumlah Koordinasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	<b>60,000,000</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Malang	Jumlah Koordinasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 Dokumen	0	
9	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Jumlah PSKS yang mendapat upaya pemberdayaan sosial (Jumlah PSKS yang mendapat upaya pemberdayaan sosial)</b>	<b>230 Orang</b>	<b>2,445,000,000</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Jumlah PSKS yang mendapat upaya pemberdayaan sosial (Jumlah PSKS yang mendapat upaya pemberdayaan sosial)</b>	<b>230 Orang</b>	<b>0</b>	
9.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	145.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pen ting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	600.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	0	
9.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	105.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
9.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Lembaga	1.475.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Lembaga	0	
9.5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Malang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Sertifikat	120.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Malang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Sertifikat	0	
III	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Kab. Malang	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>100 (%)</b>	<b>6.800.000</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Kab. Malang	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>0</b>	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pen ting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</i>	Kab. Malang	<i>Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang tertangani</i>	<i>10 Orang</i>	<i>6.800.000</i>	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</i>	Kab. Malang	<i>Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang tertangani</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
10.1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Malang	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang tertangani	10 Orang	6.800.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Malang	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang tertangani	0	0	
IV	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kab. Malang	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial</b>	<b>100 (%)</b>	<b>2,375,000,000</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kab. Malang	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial</b>	<b>100 (%)</b>	<b>0</b>	
11	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	Kab. Malang	<i>Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	<b>10 Dokumen</b>	<b>2,125,000,000</b>	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	Kab. Malang	<i>Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	<b>10 Dokumen</b>	<b>0</b>	
11.1	Penyediaan Permakanan	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	245 Orang	245.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	0	
11.2	Penyediaan Sandang	Kab. Malang	jumlah paket bantuan sandang yang diberikan kepada PMKS	50 Orang	31.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Malang	jumlah paket bantuan sandang yang diberikan kepada PMKS	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pen ting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.3	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	265 Orang	415,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	0	
11.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	27,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	
11.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Malang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	350,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Malang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	0	
11.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Malang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	921,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Malang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	0	
11.7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Malang	Jumlah PMKS yang menerima Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Orang	30.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Malang	Jumlah PMKS yang menerima Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	0	0	
11.8	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	51,000,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pen ting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	24,000,000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	
11.10	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	29.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	
12	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Jumlah PMKS selain anak, disabilitas dan lansia yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>250,000,000</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Jumlah PMKS selain anak, disabilitas dan lansia yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial</b>	<b>3 Dokumen</b>	0	
12.1	Penyediaan Permakanan	Kab. Malang	jumlah paket bantuan permakanan yang diberikan kepada PMKS selain anak,disabilitas dan lansia	25 Orang	60.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Malang	jumlah paket bantuan permakanan yang diberikan kepada PMKS selain anak,disabilitas dan lansia	0	0	
12.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Malang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	71,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Malang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pen ting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Malang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	119,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Malang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	0	
<b>v</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Kab. Malang	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>100 (%)</b>	<b>3.350.000.000</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Kab. Malang	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>100 (%)</b>	<b>0</b>	
13	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Jumlah Data Fakir Miskin yang mendapatkan Pelayanan</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3.350.000.000</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Jumlah Data Fakir Miskin yang mendapatkan Pelayanan</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>23.000.000.000</b>	
13.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	390 Keluarga	1.100.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	390 Dokumen	0	
13.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Malang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.500.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Malang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	21000 Keluarga	23.000.000.000	
13.3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Malang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	750.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Malang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	0	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pen ting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Kab. Malang	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 (%)	975,000,000	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Kab. Malang	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 (%)	0	
14	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	Kab. Malang	<i>Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	295 Paket	325,000,000	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	Kab. Malang	<i>Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	300 Orang	0	
14.1	Penyediaan Makanan	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	220.000.000	Penyediaan Makanan	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	0	
14.2	Penyediaan Sandang	Kab. Malang	jumlah bantuan sandang yang diberikan kepada KBA/KBS	245 Orang	105,000,000	Penyediaan Sandang	Kab. Malang	jumlah bantuan sandang yang diberikan kepada KBA/KBS	0	0	
15	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Kab. Malang	<b>Jumlah Kampung Siaga Bencana</b>	<b>7 KSB</b>	650,000,000	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Kab. Malang	<b>Jumlah Kampung Siaga Bencana</b>	<b>7 Kampung</b>	0	
15.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Malang	Jumlah Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kampung	390,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Malang	Jumlah Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kampung	0	
15.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	80 Orang	260.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Malang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	90 Orang	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pen ting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
VII	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Kab. Malang	<b>Persentase terciptanya fungsi TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keberintisan</b>	<b>100 (%)</b>	<b>600,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Kab. Malang	<b>Persentase terciptanya fungsi TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keberintisan</b>	<b>100 (%)</b>	0	
16	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	<b>Kab. Malang</b>	<i>Jumlah TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keberintisan</i>	<b>2 Kali</b>	<b>600,000,000</b>	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	<b>Kab. Malang</b>	<i>Jumlah TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keberintisan</i>	<b>13 Makam</b>	0	
16.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Malang	Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	600,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Malang	Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	13 Makam	0	
16.2	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Malang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Malang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	
	<b>T O T A L</b>				<b>18.032.750.000</b>					<b>29,822,934.850</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Proses bagaimana usulan program/kegiatan diperoleh, kesesuaian tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi maka berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Tahun 2024 maka Dinas Sosial Kabupaten Malang mendapatkan Usulan sebagaimana dalam Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>PENGUSUL</b>	<b>URUSAN</b>	<b>USULAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>CATATAN</b>
1	HOSEN	SOSIAL	Usulan Berupa Alat Bantu Mobilitas Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Walker, Kruk, Tongkat Tuna Netra)	Hasil Koordinasi Lebih Lanjut dengan Dinas Sosial	NF1 - Usulan Berupa Alat Bantu Mobilitas Bagi Penyandang Disabilitas dan lanjut Usia (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Walker, Kruk, Tongkat Tuna Netra), banyak penyandang disabilitas yang kurang perhatian dari pemerintah	Jl. Raya Diponegoro Sumberkerto Dsn Sumberwader RT 07 RW 02, Kab. Malang, Pagak, Sumberkerto	
2	IDHINNINGRUM	SOSIAL	Usulan Berupa Alat Bantu Mobilitas Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Walker, Kruk, Tongkat Tuna Netra)	Hasil Koordinasi Lebih Lanjut dengan Dinas Sosial	F4-PENGAJUAN KURSI RODA 2, WALKER 1, ALAT BANTU DENGAR 2 DAN KRUK 1	DESA SUMBERPORONG, Kab. Malang, Lawang, Sumberporong	
3	NUR SAID	SOSIAL	Usulan Berupa Alat Bantu Mobilitas Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Walker, Kruk, Tongkat Tuna Netra)	Hasil Koordinasi Lebih Lanjut dengan Dinas Sosial	NF 2 - Adanya warga disabilitas yang kurang mampu	jl.raya gunung kawi rt.003 dusun rekesan, Kab. Malang, Kepanjen, Talangagung	
4	TITIK KHOLADAWILA	SOSIAL	Usulan Berupa Alat Bantu Mobilitas Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Walker, Kruk, Tongkat Tuna Netra)	Hasil Koordinasi Lebih Lanjut dengan Dinas Sosial	NF3-Banyak Masyarakat yang butuh bantuan alat kesehatan	Desa Duwet RT 22 RW 04, Kab. Malang, Tumpang, Duwet	

<b>NO</b>	<b>PENGUSUL</b>	<b>URUSAN</b>	<b>USULAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>CATATAN</b>
5	MOCHAMAD SHOLEH	SOSIAL	Usulan Berupa Alat Bantu Mobilitas Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Walker, Kruk, Tongkat Tuna Netra)	Hasil Koordinasi Lebih Lanjut dengan Dinas Sosial	NF3-terdapat disabilitas yang belum mempunyai alat bantu	Desa Malangsuko, Kab. Malang, Tumpang, Malangsuko	
6	ARIF SUJONO	SOSIAL	Usulan Berupa Alat Bantu Mobilitas Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Walker, Kruk, Tongkat Tuna Netra)	Hasil Koordinasi Lebih Lanjut dengan Dinas Sosial	NF5 - Banyak warga yang membutuhkan alat bantu dengar dan kursi roda.	Desa Harjokuncaran, Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Harjokuncaran	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pada Tahun anggaran 2024 Dinas Sosial Kabupaten Malang mengakomodir usulan dari masyarakat hasil dari kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebanyak 6 (enam) usulan bidang Sosial. Dari usulan tersebut Dinas Sosial mengakomodir usulan sesuai dengan kapasitas Dinas Sosial.Usulan diakomodir pada Program Rehabilitasi Sosial.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

Adapun visi Kementerian Sosial RI adalah “Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”, yang artinya Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercerminkan dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

Misi yang ditetapkan Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
3. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
4. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Tujuan strategis yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan (2020-2024) adalah :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional.
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Sedangkan Sasaran strategis Kementerian Sosial adalah :

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan;
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

Program-Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial adalah :

**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

1. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam
2. Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
3. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
4. Jaminan Kesejahteraan sosial
5. Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH)

**Program Pemberdayaan Sosial**

1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
3. Pemberdayaan Keluarga
4. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
5. Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan, Kesetiakawanan, Sosial

**Program Rehabilitasi Sosial**

1. Pelayanan Sosial Anak
2. Pelayanan Sosial Lanjut Usia
3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
4. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
5. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna sosial

**Program Penanganan Fakir Miskin**

1. Pelayanan Sosial Anak
2. Pelayanan Sosial Lanjut Usia
3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
4. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
5. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna sosial

**Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan penyuluhan sosial,**

1. Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial
2. Pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan sosial



3. Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI)
4. Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
5. Penelitian Terapan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
6. Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
7. Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat
8. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lain Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

**Program pendukung untuk pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur dan pengelolaan data kesejahteraan sosial.**

1. Perencanaan dan Penganggaran
2. Tata Kelola Keuangan
3. Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya manusia
4. Hubungan Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana
6. Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum
7. Penyuluhan Sosial

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial**

**Tujuan pembangunan Dinas Sosial Tahun 2023 adalah :**

- Memberikan pelayanan kepada Keluarga Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Lanjut Usia Terlantar, Keluarga Rentan dan penyandang masalah lainnya.
- Memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak dan memberikan penanganan kepada korban bencana alam dan bencana lainnya.
- Memberikan pembinaan kepada anak-anak terlantar
- Memberikan pembinaan kepada penyandang cacat
- Memberikan pembinaan kepada eks penyandang penyakit sosial (eks nabi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- Memberikan pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial
- Memberikan pembinaan kepada potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya antara lain tokoh masyarakat, dunia usaha, lembaga/ kelompok wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, PSM dan Karang Taruna, dan tenaga kesejahteraan sosial lainnya.

Adapun sasaran rencana pembangunan Dinas Sosial Tahun 2024 adalah :

- Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelayanan, rehabilitasi, perlindungan dan bantuan sosial dengan prioritas utama adalah PMKS dengan kriteria :
  - Anak Nakal/Anak Nakal Korban Napza
  - Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Gelandangan/Pengemis
  - Anak Disabilitas/Penyandang Disabilitas
  - Lanjut Usia Terlantar
  - Keluarga Fakir Miskin
  - Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program-program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

##### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

##### **c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

##### **d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

**a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

**3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

**a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

Penyediaan Permakanan

Penyediaan Alat Bantu

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Pemberian Layanan Kedaruratan

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Pemberian Layanan Rujukan

**b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

**4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

**a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

**6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA**

**a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**

Penyediaan Makanan

**b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

**7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

**a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Malang yang mendukung program responsif gender adalah :

- a. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
- b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**  
**Dinas Sosial Kabupaten Malang**

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Target Capaian Kinerja					Kelompok	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1				<b>URUSAN SOSIAL</b>															
	1	06			<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>															
1.	1	06	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>						6.822.934.850							7.647.371.874	Dims Sosial	
	1	06	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)	0			Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan aksesibilitas serta kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdayasaing		100 (%)	0		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Target Capaian Kinerja				Kelompok	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 dokumen	0	
	1	06	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)	6.726.854.850						100 (%)	6.740.425.874	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	30 Orang	34 ASN	34 ASN	5.928.818.262	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				31 ASN	5.935.548.778	
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 ob	26 ob	26 ob	26 ob	798.036.588	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26 ob	794.877.096	
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 dokumen	10.000.000	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Target Capaian Kinerja					Kelompok	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Akhir Tahun SKPD													
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	0	
	1	06	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)	0						100 (%)		
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Stel	60 Stel	60 Stel	60 Stel	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60 Stel	0	
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0	10 Orang	10 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Orang	0	
	1	06	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dukungan manajemen			7 Dokumen	7 Dokumen	0						7 Dokumen	181.646.000	



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Target Capaian Kinerja					Kelompok	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah													
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Buah	15 Buah	10 Paket	10 Paket	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Paket	2.146.000	
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Buah	15 Buah	15 Paket	15 Paket	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Paket	65.000.000	
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Buah	15 Buah	15 Paket	15 Paket	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Paket	0	
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Buah	15 Buah	15 Paket	15 Paket	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Paket	10.000.000	
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15 Buah	15 Buah	15 Dokumen	15 Dokumen	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Dokumen	1.500.000	
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 HOK	15 HOK	20 Laporan	20 Laporan	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-				20 Laporan	3.000.000	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Target Capaian Kinerja					Kelompok	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														Dana Alokasi Umum						
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 HOK	50 HOK	36 Laporan	36 Laporan	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				36 Laporan	100.000.000	
	1	06	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 (%)	100 (%)	1 Dokumen	1 Dokumen	0						100 (%)	142.000.000	
	1	06	01	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	10 Unit	10 Unit	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Unit	142.000.000	
	1	06	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	96.080.000						3 Dokumen	138.000.000	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Surat	100 Surat	12 Laporan	12 Laporan	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	7.900.000	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Target Capaian Kinerja					Kelompok	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	01	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	12 Laporan	12 Laporan	42.480.000	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	46.400.000	
	1	06	01	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 OB	3 OB	12 Laporan	12 Laporan	53.600.000	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	84.000.000	
	1	06	01	2.0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	0						<b>100 (%)</b>	<b>445.000.000</b>	
	1	06	01	2.0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	15 unit	15 unit	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 unit	50.000.000	
	1	06	01	2.0 9	00 06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	360.000.000	
	1	06	01	2.0 9	01 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15 Unit	15 Unit	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana				15 Unit	35.000.000	



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Target Capaian Kinerja					Kelompok	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	02	2.0 3	00 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	-	40 Lembaga	40 Lembaga	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 Lembaga	1.475.000.000	
	1	06	02	2.0 3	00 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Lembaga	-	40 Sertifikat	40 Sertifikat	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 Sertifikat	120.000.000	
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	<b>2.0 1</b>		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>						<b>0</b>							<b>2.531.500.000</b>	
	1	06	04	2.0 1	01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	0						<b>100 (%)</b>	<b>2.276.500.000</b>	
	1	06	04	2.0 1	00 01	Penyediaan Permakanan	jumlah paket bantuan permakanan yang diberikan kepada	245 Paket	-	50 Orang	50 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana				50 Orang	250.000.000	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Target Capaian Kinerja					Kelompok	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							PMKS							Alokasi Umum						
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Paket	-	50 Orang	50 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Orang	32.000.000	
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	265 Orang	120 Orang	100 Orang	100 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Orang	420.000.000	
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Orang	29.000.000	
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	150 Orang	150 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150 Orang	360.000.000	
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	400 Orang	120 Orang	200 Orang	200 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200 Orang	1.066.000.000	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Target Capaian Kinerja					Kelompok	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota													
	1	06	04	2.01	010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Orang	52.000.000	
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Orang	2.500.000	
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Orang	31.000.000	
	1	06	04	2.02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	0						<b>100 (%)</b>	<b>255.000.000</b>	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Target Capaian Kinerja				Kelompok	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	04	2.0 2	00 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Paket	-	25 Orang	25 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25 Orang	62.000.000	
4	1	06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				100 (%)	100 (%)	0						100 (%)	24.057.999.800	
	1	06	05	2.0 2		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten			3 Dokumen	3 Dokumen	23.000.000.000						3 Dokumen	24.057.999.800	
	1	06	05	2.0 2	00 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	390 Dokumen	390 Dokumen	390 Keluarga	390 Keluarga	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				390 Keluarga	33.000.000	
	1	06	05	2.0 2	00 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	4 Dokumen	4 Dokumen	10000 Keluarga	21000 Keluarga	23.000.000.000	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21000 Keluarga	24.000.000.000	



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Target Capaian Kinerja					Kelompok	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kabupaten/Kota														
	1	06	05	2.0 2	00 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	200 Orang	200 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200 Orang	24.999.8 00	
5	1	06	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>0</b>						<b>100 (%)</b>	<b>833.611.000</b>	
	1	06	06	2.0 1		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>300 Orang</b>	<b>300 Orang</b>	0						<b>300 Orang</b>	<b>173.611.000</b>	
	1	06	06	2.0 1	00 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	245 Paket	245 Paket	200 Orang	200 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200 Orang	63.611.0 00	
	1	06	06	2.0 2		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			<b>7 Kampung</b>	<b>7 Kampung</b>	0						<b>7 Kampung</b>	<b>660.000.000</b>	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Target Capaian Kinerja					Kelompok	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	06	2.0 2	00 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Dokumen	4 Dokumen	7 Kampung	7 Kampung	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Kampung	395.000. 000	
	1	06	06	2.0 2	00 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	90 Orang	90 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90 Orang	265.000. 000	
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>07</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>													<b>700.000 .000</b>	
	1	06	07	2.0 1		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan			<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>700.000 .000</b>	
	1	06	07	2.0 1	00 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Kali	2 Kali	13 Makam	13 Makam	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13 Makam	650.000. 000	
	1	06	07	2.0 1	00 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan			1 Laporan	1 Laporan	0						1 Laporan	50.000.0 00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Praki raan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Target Capaian Kinerja					Kelom pok	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikati f (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				n									
								29.822. 934.000							38.077. 482.674	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL**

#### **4.1. Rencana Kerja Dinas Sosial**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis dalam hal perumusan, pelaksanaan bidang sosial

#### **4.2. Program/Kegiatan dan Pendanaan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program dan Kegiatan yang dirancang oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang tahun 2024, adalah :

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

###### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

###### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

###### **c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL****a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

4. **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**
  - a. **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**
    - Penyediaan Permakanan
    - Penyediaan Alat Bantu
    - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
    - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
    - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
    - Pemberian Layanan Kedaruratan
    - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
    - Pemberian Layanan Rujukan
  - b. **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**
    - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
5. **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**
  - a. **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
    - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
    - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
6. **PROGRAM PENANGANAN BENCANA**
  - a. **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
    - Penyediaan Makanan
  - b. **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**
    - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
    - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

**7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

**a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional  
Kabupaten/Kota**

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional  
Kabupaten/Kota

Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional  
Kabupaten/Kota

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang tahun 2024 dapat dilihat di tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Tahun 2024**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Praktis Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok sasaran	Keterangan	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
															Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1					<b>URUSAN SOSIAL</b>												
	1	06				<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>												
1.	1	06	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>						6.822.934.850						Dinas Sosial
	1	06	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)	0			Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan aksesibilitas serta kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdayasaing		
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	01	2.0		<b>Administrasi Keuangan</b>	Persentase pemenuhan	100 (%)	100 (%)	100 (%)	100	6.726.8						



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok sasaran	Keterangan	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
															Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2		<b>Perangkat Daerah</b>	dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah				(%)	54.850						
	1	06	01	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	30 Orang	34 ASN	34 ASN	5.928.818.262	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	01	2.0 2	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 ob	26 ob	26 ob	26 ob	798.036.588	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	01	2.0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	01	2.0 2	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	01	2.0 5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)	0						
	1	06	01	2.0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Stel	60 Stel	60 Stel	60 Stel	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	01	2.0 5	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0	10 Orang	10 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.0 6</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah			<b>7 Dokumen</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>0</b>						
	1	06	01	2.0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	15 Buah	15 Buah	10 Paket	10 Paket	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok sasaran	Keterangan	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
															Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Bangunan Kantor	Disediakan											
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Buah	15 Buah	15 Paket	15 Paket	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Buah	15 Buah	15 Paket	15 Paket	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Buah	15 Buah	15 Paket	15 Paket	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Buah	15 Buah	15 Dokumen	15 Dokumen	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 HOK	15 HOK	20 Laporan	20 Laporan	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 HOK	50 HOK	36 Laporan	36 Laporan	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	0						
	1	06	01	2.07	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	10 Unit	10 Unit	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	-	-	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	96.080.00						
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Surat	100 Surat	12 Laporan	12 Laporan	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Tahun	1 Tahun	12 Laporan	12 Laporan	42.480.00	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana				



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok sasaran	Keterangan	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
															Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota												
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	-	40 Lembaga	40 Lembaga	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Lembaga	-	40 Sertifikat	40 Sertifikat	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>						<b>0</b>						
	1	06	04	2.01	01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	0						
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	jumlah paket bantuan permakanan yang diberikan kepada PMKS	245 Paket	-	50 Orang	50 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Paket	-	50 Orang	50 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	265 Orang	120 Orang	100 Orang	100 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok sasaran	Keterangan	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
															Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kewenangan Kabupaten/Kota											
	1	06	04	2.0 1	00 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	150 Orang	150 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	04	2.0 1	00 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	120 Orang	200 Orang	200 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	04	2.0 1	01 0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	04	2.0 1	00 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	04	2.0 1	00 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	04	2.0 2		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	0						
	1	06	04	2.0 2	00 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Paket	-	25 Orang	25 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok sasaran	Keterangan	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
															Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	1	06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			100 (%)	100 (%)	0							
	1	06	05	2.0		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten		3 Dokumen	3 Dokumen	23.000.000.000							
	1	06	05	2.0	00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	390 Dokumen	390 Dokumen	390 Keluarga	390 Keluarga	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	05	2.0	00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	10000 Keluarga	21000 Keluarga	23.000.000.000	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Mendukung Pengarusutamaan Gender
	1	06	05	2.0	00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	200 Orang	200 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
5	1	06	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	100 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)	0						
	1	06	06	2.0		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			300 Orang	300 Orang	0							
	1	06	06	2.0	00	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	245 Paket	245 Paket	200 Orang	200 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	06	2.0		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap</b>	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			7 Kampung	7 Kampung	0						

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok sasaran	Keterangan	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
															Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						<b>Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>												
	1	06	06	2.0 2	00 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Dokumen	4 Dokumen	7 Kampung	7 Kampung	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	06	2.0 2	00 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	90 Orang	90 Orang	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>07</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>												
	1	06	07	2.0 1		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan			<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	07	2.0 1	00 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Kali	2 Kali	13 Makam	13 Makam	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	06	07	2.0 1	00 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1 Laporan	1 Laporan	0						
												<b>29.822.934.000</b>						

Penyerapan Anggaran yang sesuai rencana akan mempengaruhi capaian yang baik pula. Kecenderungan penurunan penyerapan anggaran harus segera diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan Program. Dinas Sosial mengupayakan langkah-langkah agar penurunan penyerapan tidak terjadi Tribulan berikutnya. Rencana Penyerapan pada Tribulan I sebesar 6 % dikarenakan lebih banyak pada kegiatan rutin permulaan tahun Dinas Sosial dan Persiapan Administrasi, Tribulan II sebesar 20.8 % pada Persiapan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada Pekerja Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau; Tribulan III sebesar 39.80 % pada Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai serta Monitoring Program Keluarga Harapan; dan Pada Tribulan IV Pelaksanaan Kegiatan lanjutan masing-masing bidang; Adapun Rencana Penyerapan Anggaran Kas Dinas Sosial pada Tahun 2024 dapat dilihat di tabel 4.2









No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Praktik Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Ket erangan	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		I		II		III		IV			
															Nasional		Daerah	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan							Dana Alokasi Umum												
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 HOK	15 HOK	20 Laporan	20 Laporan	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 HOK	50 HOK	36 Laporan	36 Laporan	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	06	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1	06	01	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	10 Unit	10 Unit	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	06	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>96.080.000</b>						<b>25</b>	<b>24.020.000</b>	<b>25</b>	<b>24.020.000</b>	<b>25</b>	<b>24.020.000</b>	<b>25</b>	<b>24.020.000</b>	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Surat	100 Surat	12 Laporan	12 Laporan	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	12 Laporan	12 Laporan	42.480.000	Kab. Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				25	10.620.000	25	10.620.000	25	10.620.000	25	10.620.000	















No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Praktik Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Keterangan		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		I		II		III			IV	
																Nasional	Daerah	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6	1	06	07			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>												0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	06	07	2.0 1		<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	<b>Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan</b>		100 (%)	100 (%)	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	06	07	2.0 1	00 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Kali	2 Kali	13 Makam	13 Makam	0	Kab. Malang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	06	07	2.0 1	00 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1 Laporan	1 Laporan	0							0	0	0	0	0	0	0	0	
																		6	1.9 14. 84 2.8 60	20. 08	1.7 97. 73 3.7 13	39. 80	24. 47 5.7 33. 71 3	20. 10	1.8 20. 73 3.7 13	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pada Renja Dinas Sosial Tahun 2024 ini terdapat 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terjadi perubahan yang disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan perundang-undangan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial Tahun 2024, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2024 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.

Renja Dinas Sosial Tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi, dan efektivitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah serta untuk mengetahui efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan dipertanggung jawabkan kepada Bupati.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**SANUSI**